



Kementerian PPN/
Bappenas



Australian Government

SERI KERTAS KERJA KOMPAK NO. 4



PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGAWAL PENERAPAN SEPAKAT UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENURUNAN KEMISKINAN DI DAERAH

Desember 2017



Kertas kerja ini disusun oleh Tim Ahli KOMPAK atas permintaan Bappenas. Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK.

Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersial.

Untuk meminta salinan laporan ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai kertas kerja ini, silakan hubungi Tim Komunikasi KOMPAK (communication@kompak.or.id).

Saran Kutipan:

Murniningtyas, Endah. (2017). Seri Kertas Kerja KOMPAK Nomor 4: Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan SEPAKAT untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah. Bappenas dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Jalan Taman Suropati No. 2,
Menteng, Jakarta Pusat.

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72,
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

Seri Kertas Kerja KOMPAK No. 4

Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan Sepakat untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah

Desember 2017

DAFTAR ISI

Daftar Gambar	i
Daftar Tabel	i
Daftar Lampiran.....	i
Akronim.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
1. Pendahuluan.....	1
2. Peran Sistem SEPAKAT untuk Peningkatan Sinergi dan Efektivitas Penurunan Kemiskinan	4
3. Peran Perguruan Tinggi dalam Penerapan SEPAKAT	8
4. Penutup	12
Lampiran.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Faktor Kunci Penggunaan Dana Pembangunan (dan Dana Desa) yang Menyejahterakan Masyarakat	4
Gambar 2. Penyatuan SIMPADU dan P3BM Menjadi SEPAKAT	5
Gambar 3. Siklus Langkah Penurunan Kemiskinan dengan Menggunakan Instrumen SEPAKAT	10
Gambar 4. Kementerian dan Lembaga serta SKPD yang Terlibat dan Program Terkait	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah, Kegiatan, Lembaga serta Sumber Informasi untuk Mendukung Penurunan Kemiskinan secara Terpadu - Contoh	11
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970–2017	13
--	----

AKRONIM



APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bapermas	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
BDT	: Basis Data Terpadu
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pemda	: Pemerintah Daerah
P3BM	: <i>Pro Poor Planning, Budgeting, and Monitoring</i>
SIMPADU	: Sistem Informasi Terpadu
SEPAKAT	: Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berbagai instrumen dibangun untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan penurunan kemiskinan. Pemerintah Indonesia membangun sistem *pro poor planning budgeting and monitoring* (P3BM) untuk membantu pemda memetakan kemiskinan, menyusun program dan anggaran sesuai dengan dan mengarahkan program pembangunan sesuai identifikasi dari peta kemiskinan. Pemerintah juga membangun sistem informasi terpadu (SIMPADU) yakni



suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk PNPM. Program ini mampu membantu pemerintah mengalokasikan dana PNPM sesuai kondisi dan keinginan masyarakat lokal. Kedua sistem (P3BM dan SIMPADU) yang juga berisi instrumen elektronik sudah disatukan ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan analisis kemiskinan terpadu (SEPAKAT), yang di dalamnya masih memanfaatkan tools yang digunakan dalam P3BM dan SIMPADU. SEPAKAT telah diujicobakan di Pacitan dan Bantaeng, dan mampu membantu pemda dalam mensinergikan berbagai program dan mengarahkan ke penerima manfaat. Dengan demikian alat ini dapat digunakan oleh pemda untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di semua wilayah dan setiap anggota masyarakat di daerah tersebut, sebagai langkah ini penting untuk menjalankan semangat *Sustainable Development Goals (SDGs) no one left behind*. Untuk itu, SEPAKAT perlu dimatangkan dan disebarluaskan manfaat dan kegunaannya. Penerapan secara konsisten dan kontinu (sinambung) dibutuhkan untuk melaksanakan penurunan kemiskinan secara efektif. Untuk itu, disarankan penempatan SEPAKAT tidak hanya di pemda, namun juga di perguruan tinggi setempat agar menghindari bias yang sering terjadi di kalangan birokrasi. Selain itu, pelibatan perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan penggunaan SEPAKAT sesuai kondisi daerah. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah ialah mereka memiliki lembaga yang dapat memberikan *feedback* untuk penyempurnaan langkah dan kebijakan penurunan kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Program pengurangan kemiskinan terus dilakukan, namun jumlah masyarakat miskin dan kesenjangan masih tinggi. Tingkat kemiskinan memang telah turun dari 17,75 persen pada 2006 menjadi 10,70 persen tahun 2016 (September). Angka ini setara dengan penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari 39,3 juta (2006) menjadi 27,76 juta (2016), yang menandakan masih besarnya jumlah orang miskin di Indonesia. Tingkat kesenjangan (*Gini Ratio*) pendapatan antarkelompok juga membesar, dari 0,376 (2007) menjadi 0,394 (September 2016). Dari jumlah masyarakat miskin ini, lebih dari 63 persen, atau 17,28 juta penduduk tinggal di perdesaan.¹

Beberapa penyebab kemiskinan di perdesaan antara lain (i) akses masyarakat miskin kepada sumber daya produktif, baik lahan maupun permodalan masih rendah; (ii) akses layanan dasar juga masih rendah; (iii) lapangan pekerjaan semakin langka, baik pertanian maupun pekerjaan lainnya; dan (iv) usaha/perusahaan dimiliki orang luar daerah, sehingga pendapatan lebih banyak terangkut keluar, mengakibatkan “kebocoran” di daerah. Sebagai akibatnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin deras. Lahan pertanian banyak dijual untuk perumahan, penduduk kota dan penggunaan lain. Warga desa kehilangan aset terbesar dan apabila masih tinggal di desa akan menjadi buruh di lahan mereka sendiri.

Pencapaian target penurunan kemiskinan memerlukan langkah yang efektif. Dengan target penurunan kemiskinan menjadi 5–6 persen pada 2019 dan semangat “penghapusan” kemiskinan pada 2030 sesuai dengan SDGs, maka perlu dilakukan langkah-langkah baru yang lebih efektif untuk “menyapu kemiskinan”. Presiden Jokowi menekankan kepada jajaran kabinetnya agar: (i) APBN mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan; (ii) kebijakan belanja APBN harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal; (iii) fokus dalam meningkatkan kualitas belanja yang produktif serta belanja yang prioritas, seperti mendorong pembangunan infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, penguatan desentralisasi fiskal, dan juga subsidi tepat sasaran; dan (iv) tidak perlu banyak program, “fokus” pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat.²

Terkait dengan dana desa, alokasinya telah ditingkatkan dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp60 triliun tahun 2017 untuk 74.954 desa. Pemerintah harus memastikan pemanfaatan dana desa berjalan optimal di lapangan. Pertama, untuk hal-hal produktif yang langsung membuka lapangan kerja. Semua harus dikerjakan di desa dan prosesnya dilakukan oleh warga desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Kedua, melakukan pendampingan sebaik mungkin untuk mengawal jalannya pembangunan di desa. Pendampingan terkait dengan jenis proyek, waktu pengerjaan, dan monitoring manajemen lapangan. Ketiga, menginstruksikan kepala-kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa sesuai kebutuhan yang ada. Keempat, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi penggunaan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat.³

¹ Lampiran 1

² <http://www.presidentri.go.id>berita-aktual 30 September 2016-Arahkan APBN untuk Belanja Produktif dan Prioritas>

³ <http://www.presidentri.go.id>berita-aktual 18 Oktober 2017-Ajak Masyarakat Awasi Program Dana Desa>

Walaupun alokasi dana desa dari tahun ke tahun meningkat, masih muncul berbagai tantangan terkait penggunaan dana desa antara lain: (i) apakah dana untuk pembangunan desa benar-benar sampai ke desa?; (ii) apakah penggunaan dana menjawab kebutuhan pembangunan desa dan masyarakatnya?; (iii) bagaimana kemampuan aparat desa untuk menggunakan dana desa?; dan (iv) bagaimana peran Camat dan Bupati untuk ikut mengawal dan mengarahkan dana desa agar menurunkan kemiskinan di desa? Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan dengan melakukan (i) sinergi sumber dana dan program; (ii) memadukan berbagai instrumen penurunan kemiskinan; dan (iii) pengawasan serta pendampingan intensif.
- b. Memastikan dana pembangunan digunakan untuk peningkatan akses masyarakat ke layanan dasar yang berkualitas di desa.
- c. Memastikan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan desa dan masyarakat, terutama untuk memperluas kesempatan kerja di desa dan menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Pemda kabupaten/kota dan Pemdes adalah garda depan program penanggulangan kemiskinan dan perlu penguatan kemampuan secara menyeluruh dan terpadu (cara, instrumen, kemampuan sumber daya manusia). Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan karena pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) masih memiliki berbagai program yang sejalan sehingga dapat digunakan untuk melakukan tiga langkah tersebut.

Pertama, adanya pembelajaran dari program pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Sebagai contoh: pemerintah pernah memiliki program empat klaster penanggulangan kemiskinan: perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, akses pendanaan melalui kredit usaha rakyat (KUR), dan pembangunan sarana prasarana dasar. Keempat klaster program ini berubah nama,⁴ tapi pada dasarnya tetap dilanjutkan. Program perlindungan sosial semakin luas dan besar, pelaksanaan UU Desa pada intinya adalah program pemberdayaan masyarakat, dan sampai saat ini KUR masih dilaksanakan. Pembangunan sarana prasarana dasar mempunyai target yang ambisius untuk pengadaan air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan. Intinya, pengelompokan program ini patut menjadi “pedoman” bagaimana cara penanganan kemiskinan secara komprehensif dan terpadu, dengan memadukan program yang ditujukan ke lokus (desa/ kelurahan) dan program yang ditujukan ke individu masyarakat terutama di desa, dan didukung oleh sistem pendataan sasaran yang semakin baik. Saat ini telah terdapat basis data terpadu (BDT), sehingga kartu-kartu program layanan sosial dasar relatif mudah menyasar masyarakat miskin dan rentan.

Kedua, peningkatan kapasitas aparat pemda kabupaten/kota pernah dan beberapa masih dilatih menggunakan instrumen elektronik *pro poor planning, budgeting and monitoring* (P3BM) yaitu pelatihan dan penempatan instrumen elektronik untuk membantu: (i) menyusun peta kemiskinan; (ii) pemanfaatan peta kemiskinan untuk perencanaan dan penganggaran sehingga program penanggulangan kemiskinan sampai ke lokus yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya; dan (iii) menyusun program dan pendanaan dalam dokumen anggaran daerah sesuai identifikasi dalam peta kemiskinan, sehingga sesuai kebutuhan/ kondisi masyarakat miskin.

⁴ <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf>
<http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/program-penanggulangan-kemiskinan/>

Instrumen P3BM menghasilkan penguatan kapasitas pemda untuk (i) memiliki logika yang efektif untuk menurunkan kemiskinan di kabupaten/kota; (ii) memanfaatkan instrumen tersebut untuk memetakan kondisi masyarakat miskin dan masalahnya (peta kemiskinan) serta untuk mengalokasikan dana penurunan kemiskinan sesuai kebutuhan (penelaahan dan penyusunan anggaran). Instrumen ini sudah dikombinasikan dengan sistem informasi terpadu (SIMPADU) yang memiliki cara untuk memonitor penggunaan anggaran sampai ke tingkat kecamatan dan desa.

Ketiga, dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), pemerintah menyusun SIMPADU yang digunakan untuk memantau penggunaan dana PNPM sesuai keinginan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau desa. Data dalam sistem tersebut kemudian digunakan untuk mengalokasikan dana PNPM setiap tahunnya, sehingga seluruh kecamatan (PNPM Perdesaan) dan kelurahan (PNPM Perkotaan) mendapatkan alokasi dana.

Keempat, instrumen P3BM dan SIMPADU atas permintaan pemda telah disatukan oleh Kementerian PPN/Bappenas menjadi SEPAKAT. Penyatuan ini mempermudah pemda kabupaten memiliki kesatuan data, kesatuan/kesinambungan instrumen elektronik (*tools*), dan pelatihan/peningkatan kapasitas dalam satu fokus (satu data, satu alat, dan satu pelatihan) untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

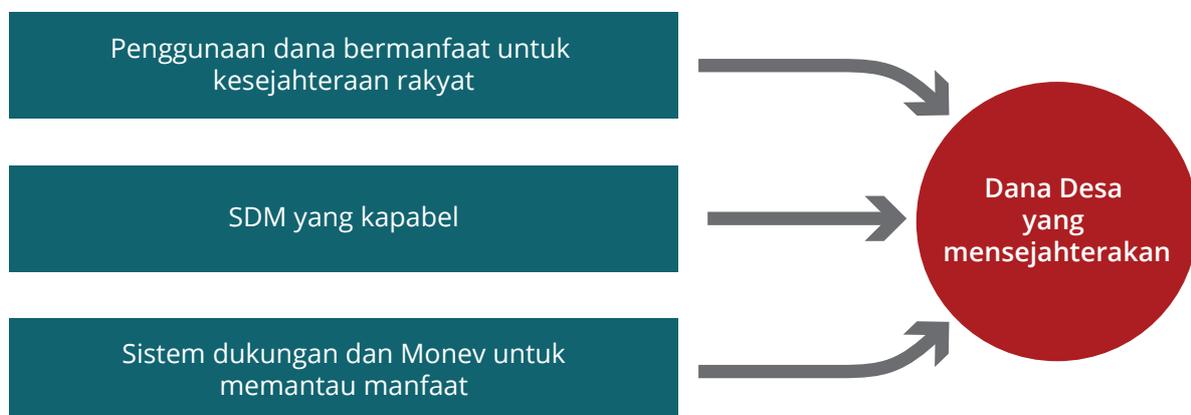
Sehubungan dengan itu, Brief Note ini akan menjelaskan manfaat SEPAKAT dalam membantu pengelolaan dana pembangunan di kabupaten/kota—yang dapat menyejahterakan masyarakat desa (termasuk dana desa)—dan pentingnya peran perguruan tinggi untuk menjaga kesinambungan dan objektivitas SEPAKAT.

2. PERAN SISTEM SEPAKAT UNTUK PENINGKATAN SINERGI DAN EFEKTIVITAS PENURUNAN KEMISKINAN

Sinergi Program untuk Efektivitas Penurunan Kemiskinan. Efektivitas program penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif dan sinergis antara program-program yang ada. Terdapat tiga faktor kunci agar anggaran penurunan kemiskinan dapat menyejahterakan masyarakat, yaitu penggunaan dana yang tepat, adanya sumber daya manusia (SDM) yang kapabel, sistem pendukung dan monitoring serta evaluasi (monev) untuk memantau dan mengevaluasi manfaat dana penurunan kemiskinan (Gambar 1). Sehubungan dengan itu, sistem SEPAKAT sesuai karakter di dalamnya, dapat digunakan untuk membantu pemda mewujudkan tiga faktor kunci guna mengelola dana pembangunan yang efektif untuk menurunkan kemiskinan masyarakat di wilayahnya, yaitu:

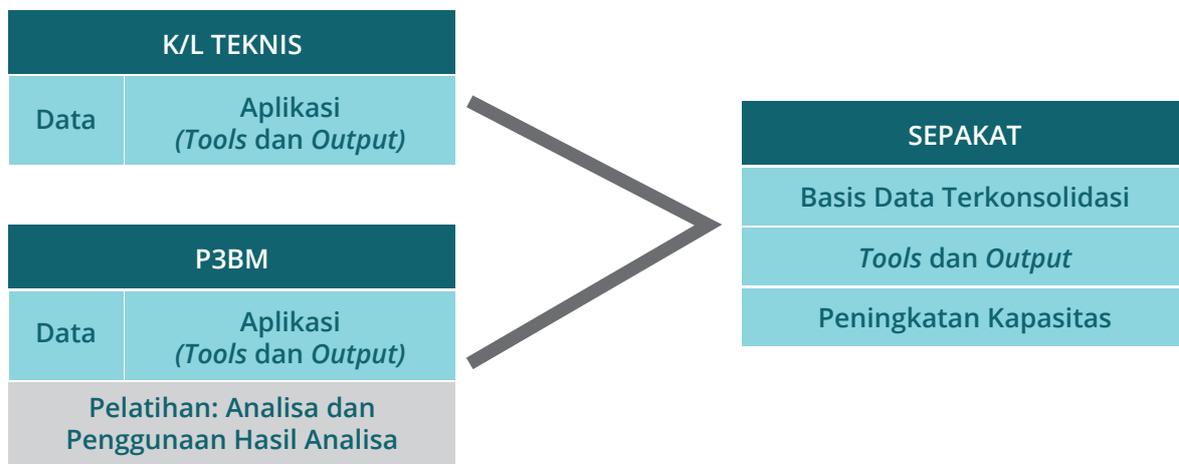
- 1) SEPAKAT dapat memberikan kerangka berpikir penurunan kemiskinan mulai dari pengenalan lokus-lokus kemiskinan dan kondisinya (peta kemiskinan).
- 2) SEPAKAT dapat digunakan untuk mengarahkan program dan anggaran sesuai peta kemiskinan dan data kemiskinan individu (basis data terpadu).
- 3) SEPAKAT dapat digunakan untuk melatih SDM pemda dan menyediakan aplikasi untuk membantu melakukan siklus perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penurunan kemiskinan.

Gambar 1. Tiga Faktor Kunci Penggunaan Dana Pembangunan (dan Dana Desa) yang Menyejahterakan Masyarakat



SEPAKAT serta Perannya untuk Sinergitas dan Efektivitas Penurunan Kemiskinan. Penyatuan P3BM dan SIMPADU secara nasional telah memudahkan pemda karena mereka tidak perlu mempelajari dua sistem (P3BM dan SIMPADU), namun cukup mempelajari satu jenis sistem dan aplikasi elektronik (Gambar 2). Penyatuan kedua sistem menjadi SEPAKAT memberi manfaat lain, yaitu: (i) terjadi efisiensi pengumpulan data (frekuensi dan jenis) oleh pemda, sehingga dapat mengurangi beban kerja; (ii) efektif karena sistem yang “baru” akan menyinergikan basis data kemiskinan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada dalam siklus penurunan kemiskinan yaitu: perencanaan-monev dan *feedback* penurunan kemiskinan di daerah; (iii) penyatuan merupakan kesempatan untuk “simplifikasi”, mendaratkan ide nasional sesuai dengan kondisi daerah dan mengedepankan peran pemda sebagai penanggung jawab penurunan kemiskinan di wilayahnya. Dengan tiga hal ini maka: penurunan kemiskinan akan lebih fokus.

Gambar 2. Penyatuan SIMPADU dan P3BM Menjadi SEPAKAT



Gambar 2 menunjukkan penyatuan sistem informasi terpadu untuk PNPM (SIMPADU) dan P3BM menjadi SEPAKAT. Dalam SEPAKAT disatukan: (i) cara berpikir dan merencanakan penurunan kemiskinan; (ii) kebutuhan dan pengelolaan data khususnya untuk mengentaskan kemiskinan; (iii) cara menggunakan output dari SEPAKAT guna mengarahkan penggunaan dana pembangunan secara keseluruhan agar tepat sasaran; dan (iv) menyatukan sistem pelatihan yang mendukung perubahan cara berpikir dalam menurunkan kemiskinan dan sistem pelatihan penggunaan instrumen elektronik.

Dengan demikian, penguasaan SEPAKAT dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pembenahan basis data dan analisis secara cepat dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. Secara spesifik tujuan SEPAKAT sebagai berikut:

1. Mengembangkan perangkat dan sistem database kemiskinan untuk membantu pemerintah daerah melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi penanggulangan kemiskinan agar efektif dan efisien dengan daya ungkit yang lebih optimal.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan data kemiskinan, serta melakukan analisis kemiskinan dengan fokus pada ketercapaian indikator kemiskinan manusia dan ketimpangan wilayah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan monitoring program dan kegiatan di daerah.

3. Memberikan alat bantu (*tools*) bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mengoordinasikan berbagai institusi di daerah dalam upaya mereka mempercepat pengentasan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan.
4. Menjembatani kesenjangan data dan informasi kemiskinan dari level desa ke tingkat yang lebih tinggi.
5. Menjadi media *quick response* dan *early warning system* terkait kinerja pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan penguasaan SEPAKAT maka diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan *exercise* analisis kemiskinan menggunakan basis data dan perangkat analisis berbasis *web* atau daring, untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran dan efisien, serta mendorong konektivitas dengan berbagai sistem informasi lainnya.⁵ Hal ini dimungkinkan karena aparat pemda memahami dan menguasai penggunaan SEPAKAT—baik untuk menganalisis data kemiskinan dan memunculkannya dalam *output/tools*—sehingga dapat mengarahkan penggunaan dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah/APBN, APBD, maupun dana lainnya (Kotak 1).

SEPAKAT dinilai dapat membantu aparat pemda kabupaten/kota mensinergikan dana yang mereka kelola untuk program penurunan kemiskinan. Untuk itu pemda perlu diyakinkan bahwa:

- (a) mensinergikan penggunaan dana penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dan tersedia perangkatnya melalui SEPAKAT, yang dapat membantu pemda mencapai tujuannya;
- (b) perlu ada SDM kunci yang membantu pemda memanfaatkan SEPAKAT untuk melaksanakan dan mengawal penggunaan dana penanggulangan kemiskinan; dan
- (c) SEPAKAT dapat menjadi alat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan program penanggulangan kemiskinan.

Dengan meyakinkan pemda atas tiga hal tersebut, penerapan SEPAKAT untuk penggunaan dana pembangunan—termasuk dana desa—akan menyejahterakan masyarakat desa sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.

Penguasaan SEPAKAT secara Bertahap. Penggunaan dana pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sangat didukung oleh adanya: (i) *link and match* antara kebutuhan dengan penggunaan dana—yang dalam prosesnya mengandalkan peta kemiskinan (hasil P3BM), penggunaan basis data terpadu, kartu program dll—agar penggunaannya tepat guna; (ii) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana; dan (iii) mekanisme pengawasan dengan cara memantau efektivitas kegiatan melalui indikator-indikator untuk mengurangi/mengatasi masalah program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran.

SEPAKAT adalah instrumen yang memudahkan upaya aparat pemerintah menurunkan angka kemiskinan. Namun, penguasaan sistem SEPAKAT secara cepat akan “mbingungkan” SDM di kabupaten/kota. Untuk itu, penguasaan pemda terhadap sistem ini perlu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pemda kabupaten hanya perlu memahami logika—dapat menggunakan instrumen dan memahami pemanfaatan

⁵ Laporan Bridging SEPAKAT, 2017

output instrumen—serta menggunakan instrumen secara konsisten untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan ini, perlu penanganan tiga unsur penting secara sinkron: (i) sumber daya manusia; (ii) cara memanfaatkan dan menggunakan SEPAKAT; dan (iii) penggunaan SEPAKAT untuk monitoring dan evaluasi. Kemahiran penggunaan SEPAKAT sebagai alat bantu—yang mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan di desa, kecamatan, dan kabupaten— sangat penting agar pemda merasakan manfaat SEPAKAT dan membuktikan bahwa SEPAKAT memberikan solusi. Tahap kedua, apabila pemda kabupaten/kota sudah “mahir”, barulah menginjak pada penguasaan pengetahuan mengenai isi SEPAKAT secara terperinci. Penguasaan sistem SEPAKAT tidak perlu diberikan kepada semua staf pemda, namun hanya diberikan kepada staf kunci daerah (yang menguasai pemrograman komputer) agar dapat memiliki “kontrol” terhadap SEPAKAT dan mengembangkannya sesuai kondisi setempat.

3. PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENERAPAN SEPAKAT

Tiga faktor kunci penggunaan dana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Gambar 1) sangat penting apabila dimiliki oleh lembaga-lembaga di tingkat pemda kabupaten/kota. Ketiga lembaga yang dapat berperan penting dalam menjaga sistem SEPAKAT adalah pemda, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pemda bertanggung jawab untuk mengenali kondisi kemiskinan di wilayahnya dan mengetahuiarganya yang masuk ke dalam BDT. Pemda juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program pembangunan harus sesuai kebutuhan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan harus tepat sesuai dengan kondisi kemiskinan serta memiliki basis data untuk memastikan targetting program yang ditujukan kepada individu masyarakat miskin. Selain itu pemda juga harus melakukan pemantauan secara konsisten. Bagi masyarakat desa, perlu dididik untuk mengetahui hak-hak mereka maupun cara penggunaan bantuan, sehingga dapat memanfaatkan sesuai tujuan.

Peran Penting Perguruan Tinggi. Sebagaimana uraian bagian sebelumnya, penerapan instrumen SEPAKAT dapat memperkuat peran pemda dalam menyusun rencana dan melaksanakan program-program pembangunan untuk penurunan kemiskinan. Namun, konsistensi pemanfaatan instrumen dan pengembangan kapasitas yang hanya ditempatkan di pemda akan memiliki beberapa risiko, yaitu:

- (i) Bias dalam perkembangannya, mengingat sering kali ketiadaan data tertentu pada waktu-waktu yang kritis akan memerlukan cara dan metode yang baik untuk menjaga kualitas dan kesinambungan sistem. Langkah ini memang dapat diatasi dengan tim data yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BPS Daerah, namun masih ada kemungkinan bias “politik” dalam proses pengadaan data tersebut.
- (ii) Kesinambungan sistem apabila ada pergantian pejabat di kalangan pemda.
- (iii) Menjaga objektivitas sistem.

Sehubungan dengan itu, SEPAKAT juga perlu ditempatkan di perguruan tinggi lokal untuk:

- (a) Mengurangi dan menghilangkan risiko. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan, penelitian riset, dan pengembangan berdasarkan proses ilmiah. Sehubungan dengan itu, penempatan SEPAKAT di perguruan tinggi akan mendorong mereka menjaga standar kualitas data secara berkesinambungan berdasarkan kaidah ilmiah. Ketiadaan data secara kontinu, pemutakhiran data, serta pengembangan data dapat dijaga secara ilmiah dan dijauhkan dari bias data karena ketidakmampuan pemda atau adanya campur tangan/keinginan politik sesaat. Selain itu instrumen dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa untuk riset dan pengembangan lebih lanjut. Keberadaan SEPAKAT di perguruan tinggi juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan/atau bahan ajar berdasar pengalaman empiris/

lapangan tentang pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan kepada sumber daya manusia yang lebih muda. Adanya SEPAKAT di perguruan tinggi juga dapat menjadi bahan riset dan pengembangan lebih lanjut, saat diperlukan adanya analisis kebijakan dan program dan adanya *review* untuk penyempurnaan kebijakan dan program di lapangan.

- (b) Ada *"oversight" capacity* (kapasitas pengawasan) program penanggulangan kemiskinan di daerah. Sejalan dengan dua peran sebelumnya, penempatan SEPAKAT di perguruan tinggi akan menambah jaringan lembaga untuk mengawasi SEPAKAT dan memperluas pemanfaatannya untuk penanggulangan kemiskinan di daerah. Penempatan SEPAKAT akan membuat perguruan tinggi memiliki kapasitas "pemanding" pemda dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk "peran pengawasan" SEPAKAT di daerah. Dalam hal ini Perguruan Tinggi dapat memberikan analisa data untuk penanggulangan kemiskinan yang netral (tidak bias politik) sebagai pembanding analisa yang dilakukan oleh pemda, yang seringkali bias politik untuk kepentingan kepala daerah.
- (c) Pemerintah pusat memiliki mitra untuk memberikan umpan balik atas upaya penurunan kemiskinan di daerah. Dengan ketiga peran tersebut pemerintah pusat memiliki mitra objektif (karena berdasar proses ilmiah) yang menjaga SEPAKAT, memanfaatkannya secara obyektif (sehingga menjadi standar lokal), dan memberikan umpan balik pada waktu diperlukan.

Dengan adanya keterlibatan perguruan tinggi, akan terjadi proses kemitraan perguruan tinggi di daerah. Mereka dapat berperan untuk memperkuat pemda kabupaten dalam melakukan

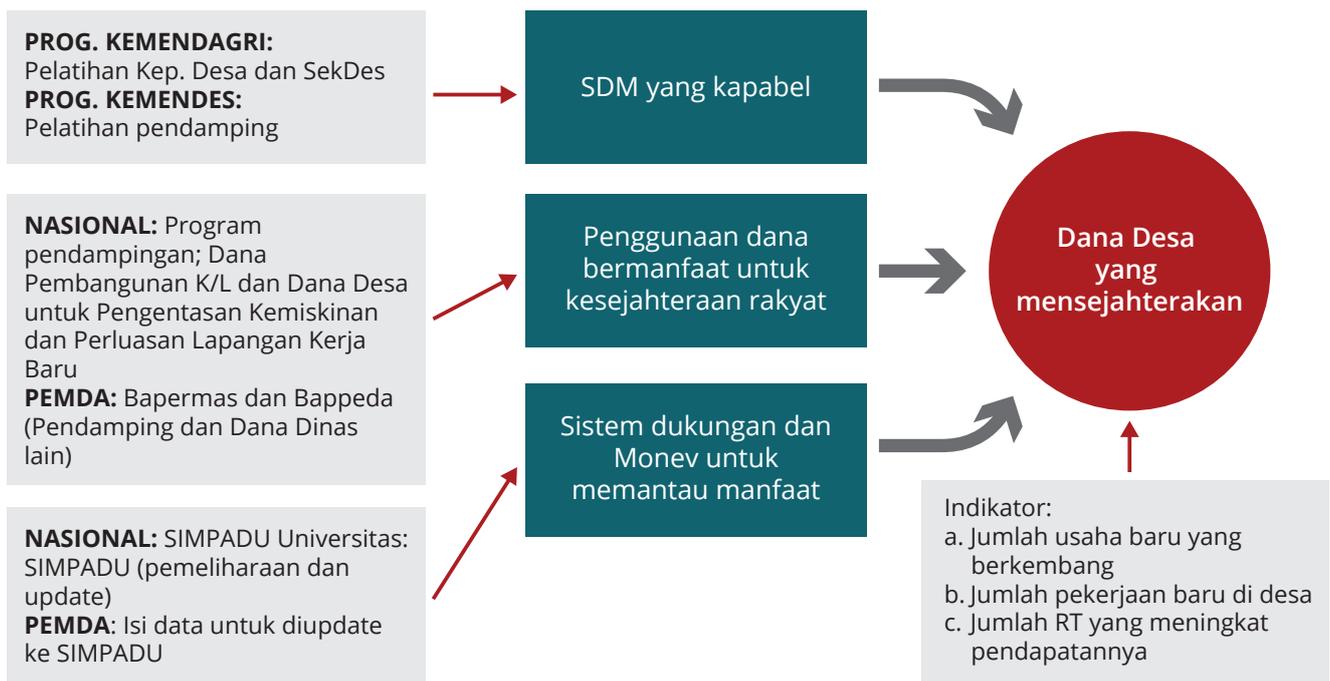
- (i) Analisis kebutuhan secara tepat. Keberadaan SEPAKAT di perguruan tinggi memberikan akses kontinu kepada perguruan tinggi saat pemerintah pusat dan daerah membutuhkannya.
- (ii) Pengawasan penyaluran dan penggunaan dana secara tepat. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pengawas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan SEPAKAT.
- (iii) Peningkatan kualitas pengelolaan meliputi:
 - (a) Sistem pengelolaan. Penempatan SEPAKAT di perguruan tinggi secara tidak langsung menempatkannya ke dalam pengelolaan yang berdasar proses pengajaran dan ilmiah sehingga akan terpelihara dan terjaga kualitasnya.
 - (b) Kemampuan SDM. Keberadaan SEPAKAT di perguruan tinggi didukung oleh sumber daya manusia yang berkemampuan dan mendorong civitas akademika menyediakan lulusan yang paham dengan program penanggulangan kemiskinan.
 - (c) Sistem monitoring-mengetahui manfaat. Perguruan tinggi menjadi "jalan" untuk mendapatkan hasil analisis SEPAKAT sekaligus memonitor langkah penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Dalam wilayahnya, kemitraan antara pemda dan perguruan tinggi akan menjaga siklus penurunan kemiskinan secara konsisten dan kontinu antarwaktu (Gambar 3). Dengan demikian, secara kontinu *"tools"* SEPAKAT akan menjadi alat bantu penurunan kemiskinan di suatu wilayah.

Gambar 3. Siklus Langkah Penurunan Kemiskinan dengan Menggunakan Instrumen SEPAKAT



Gambar 4 menunjukkan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) kunci serta SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pengenalan lembaga yang terlibat sangat penting untuk institusionalisasi dalam rangka keberlanjutan penggunaan SEPAKAT yang dibangun di daerah. Dengan demikian, lembaga terkait mengetahui bahwa SEPAKAT merupakan sistem yang digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penurunan kemiskinan.

Gambar 4. Kementerian dan Lembaga serta SKPD yang Terlibat dan Program Terkait



Sejalan dengan identifikasi K/L dan SKPD yang terlibat, semua langkah dalam Gambar 4 tidak harus dimulai dari nol. Sudah ada beberapa output dari berbagai kegiatan yang dilakukan K/L atau SKPD yang terlibat. Dengan demikian, langkah yang perlu dilakukan adalah menjalin keterpaduan, konektivitas/keterhubungan dan sinergi antara berbagai program dalam K/L, daerah, dan desa (Tabel1). Program SEPAKAT dapat membantu melakukan keterpaduan itu.

Tabel 1. Langkah, Kegiatan, Lembaga serta Sumber Informasi untuk Mendukung Penurunan Kemiskinan secara Terpadu - Contoh

LANGKAH/KEGIATAN	LEMBAGA/SKPD PENANGGUNG JAWAB DI TINGKAT KAB/KOTA	KEGIATAN/PROGRAM DI TINGKAT NASIONAL
1. Identifikasi desa dan potensinya	Bappeda, BPS Kabupaten (Daerah dalam Angka)	Podes (BPS)
2. Inventarisasi kegiatan yang pernah dan sedang dilakukan	Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas)	Program K/L terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Pendamping Desa - Kemendes • Pembangunan Nasional (K/L) – Kementerian PPN/ Bappenas -KOMPAK • Aparat Desa - Kemendagri
3. Penyusunan rencana kegiatan (SDM, pendampingan, sistem pendukung dan monev)	Bapermas, Bappeda, Perguruan Tinggi	Kementerian PPN/Bappenas (didukung KOMPAK)
4. Pelaksanaan	Bapermas, Bappeda, Perguruan Tinggi	Idem
a. Identifikasi dan Inventarisasi	Idem	Idem
b. Penyusunan rencana pelaksanaan	Idem	Idem
c. Pemutakhiran SEPAKAT-data daerah	Perguruan Tinggi	Idem
d. Pelatihan aparat desa dan pendamping	Bapermas-Perguruan Tinggi	Idem
e. Monev dan pelaporan	Bappeda-Perguruan Tinggi	Idem

Sumber: Diidentifikasi dari hasil FGD dengan LPPM Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. September 2016. Sebagai contoh

4. PENUTUP

Pemda kab/kota merupakan garda depan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya dana desa—yang nilainya akan semakin meningkat—pemda memiliki keleluasaan untuk mengoordinasikan desa guna mengefektifkan penurunan kemiskinan. Dengan demikian, penguasaan SEPAKAT dapat membantu pemda melaksanakan penurunan kemiskinan. Meskipun demikian, kontinuitas penggunaan instrumen penurunan kemiskinan seperti SEPAKAT berisiko bila hanya dilakukan di pemda saja, mengingat frekuensi rotasi yang cukup tinggi di daerah. Sehubungan dengan itu, penempatan SEPAKAT di perguruan tinggi akan membuka peluang kerjasama antara pemda dengan perguruan tinggi. Terutama adanya jaminan keberlanjutan penggunaan instrumen seperti SEPAKAT dan peluang pengembangannya sesuai kebutuhan di daerah di kemudian hari.

Beberapa catatan terkait perkembangan SEPAKAT yang mendekati berakhirnya masa bridging antara lain:

- a. Aplikasi elektronik SEPAKAT sudah selesai dalam masa bridging dan dapat didemonstrasikan menggunakan data riil. Mengingat ada dua kabupaten pilot yaitu Pacitan dan Bantaeng, SEPAKAT harus mampu "*fully running*" di kedua kabupaten tersebut dalam waktu dekat. Contoh pemanfaatan SEPAKAT secara penuh (*fully running*) akan memberikan gambaran empiris bahwa SEPAKAT memberikan solusi untuk terus menyempurnakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan bukan hanya beban bagi pemda.
- b. Menempatkan SEPAKAT di unit kerja Bantaeng dan Pacitan untuk dapat diujicobakan penggunaannya oleh aparat pemda. Dalam tahap ini pemda lebih banyak fokus pada "kemampuan menggunakan" SEPAKAT untuk membantu pelaksanaan penurunan kemiskinan di wilayahnya dengan menggunakan program dan anggaran program pembangunan yang ada (APBN dan APBD).
- c. Pengenalan SEPAKAT bagi perguruan tinggi dapat dilakukan melalui workshop di universitas terdekat dengan daerah pilot atau yang dinilai mampu membantu kedua daerah pilot. Selanjutnya, pengenalan bagi perguruan tinggi dapat dilakukan melalui workshop di beberapa universitas dengan kriteria tertentu. Ini berguna untuk melihat minat perguruan tinggi pada alat bantu SEPAKAT. Kriteria universitas yang dilibatkan dapat berupa: (i) universitas yang selama ini memiliki rekam jejak dalam program penanggulangan kemiskinan; dan (ii) universitas yang secara nasional akan dijadikan "*anchor*" untuk penanggulangan kemiskinan nasional.
- d. Muncul pemikiran awal untuk membentuk (i) paket pembelajaran SEPAKAT di Kab/kota lain dan perguruan tinggi; dan (ii) *positioning* atau keterkaitan SEPAKAT dengan sistem informasi perencanaan pusat-daerah yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Sebagai awal, bisa dilakukan analisis bagaimana SEPAKAT di Kabupaten Pacitan dan Bantaeng dapat meningkatkan kualitas input rencana pembangunan daerah ke dalam sistem perencanaan pusat-daerah yang juga dikelola Kementerian PPN/Bappenas.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970–2017

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA ORANG)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)	
	KOTA	DESA	KOTA+DESA	KOTA	DESA	KOTA+DESA	KOTA	DESA
1970	n.a	n.a	70,00	n.a	n.a	60,00	n.a	n.a
1976	10,00	44,20	54,20	38,80	40,40	40,10	4 522	2 849
1978	8,30	38,90	47,20	30,80	33,40	33,30	4 969	2 981
1980	9,50	32,80	42,30	29,00	28,40	28,60	6 831	4 449
1981	9,30	31,30	40,60	28,10	26,50	26,90	9 777	5 877
1984	9,30	25,70	35,00	23,10	21,20	21,60	13 731	7 746
1987	9,70	20,30	30,00	20,10	16,10	17,40	17 381	10 294
1990	9,40	17,80	27,20	16,80	14,30	15,10	20 614	13 295
1993	8,70	17,20	25,90	13,40	13,80	13,70	27 905	18 244
1996	7,20	15,30	22,50	9,70	12,30	11,30	38 246	27 413
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47	42 032	31 366
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,20	96 959	72 780
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43	92 409	74 272
2000	12,31	26,43	38,74	14,60	22,38	19,14	91 632	73 648
2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41	100 011	80 382
2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,10	18,20	130 499	96 512
2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42	138 803	105 888
2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66	143 455	108 725
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97	165 565	117 365
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75	174 290	130 584
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187 942	146 837
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204 896	161 831
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222 123	179 835
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232 989	192 354
Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253 016	213 395
September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263 594	223 181
Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267 408	229 226
September 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66	277 382	240 441
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289 042	253 273
September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308 826	275 779
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318 514	286 097
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326 853	296 681
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342 541	317 881
September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356 378	333 034

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA ORANG)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)	
	KOTA	DESA	KOTA+DESA	KOTA	DESA	KOTA+DESA	KOTA	DESA
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364 527	343 647
September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372 114	350 420
Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385 621	361 496

Sumber: BPS

Catatan:

1. Sejak Desember 1998 digunakan standar kemiskinan baru yang merupakan penyempurnaan standar lama. Data tahun 1976-1996 menggunakan standar lama, angka tahun 1996-2013 menggunakan standar baru
2. Referensi waktu untuk seluruh data adalah Februari, kecuali data tahun 1998 (Desember) dan tahun 2006-2010 (Maret). Data mulai tahun 1999 tanpa Timor Timur

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Indonesia, 10320
T +62 21 8067 5000
F +62 21 3190 3090
E info@kompak.or.id
www.kompak.or.id